



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 25 Mei 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 13.45 - 16.25 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Teuku Riefky Harsya, MT.</b> / Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Persiapan pelaksanaan SEA Games ke-28 pada tanggal 5-6 Juni 2015 di Singapura; 2. Membahas permasalahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No.01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: a. 30 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. 1. Ketua Umum KONI; 2. Ketua Umum KOI; 3. Kepala Satlak Prima; 4. Chef de Mission (CdM) SEA Games ke-28 di Singapura, beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harsya, MT., membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Satlak Prima dan CDM Indonesia untuk SEA Games XXVIII 2015 di Singapura pada pukul 13.45 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. CATATAN RAPAT

### 1. Persiapan Indonesia menghadapi SEA Games XXVIII Tahun 2015 di Singapura

- 1) Komisi X DPR RI mengapresiasi program-program serta langkah-langkah KONI, KOI, Satlak Prima, dan CDM Indonesia dalam membina cabang olahraga prestasi untuk mencapai prestasi SEA Games XXVIII 2015 dan mengelola keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games XXVIII 2015 di Singapura.
- 2) Dalam rangka persiapan SEA Games XXVIII 2015 di Singapura, KONI, KOI dan Satlak Prima, menyampaikan beberapa kendala dan permasalahan, antara lain:

#### **Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Satlak Prima :**

- a. Lambatnya pengadaan perlengkapan dan peralatan (pertandingan dan berlatih)
- b. Permasalahan pengiriman peralatan bertanding (Kuda, Dayung, atletik, Panahan, dan Bowling)
- c. Pengiriman atlet cabang olahraga non pelatnas (*Hockey dan Pentaque*)
- d. Panjangnya birokrasi dukungan terhadap *Try Out* dan *Training Camp*.
- e. Kepastian jumlah cabang olahraga yang ikut dalam SEA Games diluar pelatnas.

#### **Komite Olimpiade Indonesia (KOI)**

Kurangnya informasi mengenai alokasi anggaran dari Kemenpora RI untuk persiapan dan pelaksanaan SEA Games XXVIII 2015.

- 3) Terkait persiapan SEA Games XXVIII 2015, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut :
  - a. Terhadap kendala dan permasalahan sebagaimana angka 2 diatas, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti pada Rapat Kerja dengan Menpora RI dalam waktu dekat.
  - b. KONI dan KOI perlu memastikan jumlah Official dari masing-masing cabang olahraga benar-benar sesuai kebutuhan SEA Games XXVIII 2015.
  - c. Agar KONI, KOI dan Satlak Prima melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan cabor dan jumlah atlet pada multi event kedepan.
  - d. Terkait dengan paparan KONI mengenai persiapan Olimpiade 2016, Asian Games 2018, Persiapan PON 2016, Persiapan PON Remaja 2017, Persiapan PON 2020 dan kebutuhan anggaran KONI, KOI dan Prima akan dilakukan pembahasan pada RDPU yang akan datang.

### 2. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 01307 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui, tertanggal 17 April 2015.

- 1) Terhadap permasalahan sepakbola nasional, KONI telah melakukan kajian dan analisa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, Statuta FIFA, Statuta PSSI, AD/ART KONI dan menyampaikan pandangan agar DPR RI mendesak Pemerintah meninjau kembali Surat Keputusan Menpora RI Nomor **01307 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui tanggal 17 April 2015.**
- 2) Terhadap permasalahan sepakbola nasional, KOI menyampaikan pandangan bahwa Surat Keputusan Menpora RI **Nomor 01307 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui, tertanggal 17 April 2015 telah melanggar Statuta FIFA.** Selanjutnya KOI meminta Pemerintah untuk tetap mengakui kegiatan keolahragaan PSSI dan memberikan kesempatan kepada PSSI untuk melakukan pembenahan. Selanjutnya, KOI akan menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi X DPR RI terkait hasil pertemuan dengan FIFA.
- 3) Komisi X DPR RI mengingatkan agar segala penyelesaian persengketaan dan permasalahan hukum dalam olahraga dimasa mendatang dapat ditempuh melalui BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia), sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN.
- 4) Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti pandangan dan rekomendasi KONI dan KOI terkait permasalahan sepakbola nasional dalam rapat kerja dengan Menpora RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.25 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, MT.